

# **PARTISIPASI DAN KESIAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)<sup>1</sup> (Gagasan Rektor)**

**Prof. DR. A. Dirwan MSc<sup>2</sup>**

## **ABSTRACT**

Along with the reality in the era of globalization, education has been entered on one of the international commodities, based on several studies that Indonesia will face increasing challenges in the global competition. Globalization of education are difficult to avoid, so that higher education institutions in various parts of the world, including Indonesia, supposedly able to adjust themselves to become involved in the process. Although it can be said education globalization as an inevitability, stakeholders need to be prepared, so that education is not only the effects of globalization talkative follow global dynamics.

## **Pendahuluan**

Seiring dengan kenyataan dalam era globalisasi saat ini, pendidikan telah masuk pada salah satu komoditi internasional, berdasarkan beberapa kajian Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat dalam persaingan global. Globalisasi pendidikan sulit dihindarkan, sehingga lembaga pendidikan tinggi (Lemdikti) diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dituntut mampu menyesuaikan diri untuk ikut terlibat dalam proses tersebut. Meskipun dapat dikatakan globalisasi pendidikan sebagai sebuah keniscayaan, pemangku kepentingan perlu mempersiapkan diri, sehingga globalisasi pendidikan bukan hanya efek latak mengikuti dinamika global.

Peluang dibukanya pendidikan asing di Indonesia seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, menunjukkan makin beratnya tantangan bagi Lemdikti. Pesaing dalam meraih kepercayaan masyarakat selama ini, hanya perguruan tinggi ne-

geri dengan bantuan keuangan pemerintah, akan bertambah lagi dengan perguruan tinggi asing, yang modalnya jauh lebih besar.

Dengan demikian, harus diakui bahwa upaya lembaga pendidikan melaksanakan tugasnya tidaklah mudah, bahkan cenderung makin menghadapi banyak tantangan. Celah bagi masuknya pendidikan asing yang semula lebih didominasi pemikiran dan inisiatif pemerintah, kini telah diperkuat oleh UU Pendidikan Tinggi. Hal ini memberi ruang yang makin besar bagi masuknya pendidikan asing ke Indonesia, tanpa memiliki batasan yang proporsional bagi pengembangan pendidikan nasional. Secara lengkap Pasal 90 UU PT yang menunjukkan hal tersebut, adalah:

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui dinegaranya.

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Peluang dan Tantangan SDM Indonesia Dalam Memasuki MEA 2015, FKMP Unsurva, Jakarta, 3 Oktober 2015.

<sup>2</sup> Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

- (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Memperoleh ijin Pemerintah;
  - b. Berprinsip nirlaba;
  - c. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan
  - d. Mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 90 di atas jelas menunjukkan keterbukaan yang cukup luas kepada pendidikan asing untuk hadir dalam menyelenggarakan pendidikan di tanah air. Syarat yang diberikan praktis hanya akreditasi/pengakuan dari pemangku kepentingan di negara asal, kerjasama dengan penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia, keikutsertaan SDM Indonesia. Meskipun masih dapat dipertajam dengan peraturan menteri, tetap saja secara paradigmatik Pasal 90 ini memberikan keleluasan bagi siapapun untuk membuka usaha pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu pasal ini perlu kita kaji secara mendalam, dikaitkan dengan aspek nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya bangsa sebagai upaya membentuk karakter bangsa, yang seharusnya muncul menjadi bagian integral dalam sebuah lembaga pendidikan. Menghadapi masalah ini menjadi penting untuk mencari langkah strategis guna

menyiapkan Lemdikti dalam persaingan globalisasi pendidikan, antara lain melalui partisipasi. Partisipasi bukan asal ikut-ikutan, namun dengan suatu respon yang positif. Kurangnya responsif akan menimbulkan suatu bentuk kehilangan keterhubungan (*loss of a relationship*), kehilangan partisipatif (*loss of participation*) dan kehilangan kemampuan mengendalikan (*loss of control*) dalam kehidupan sosial masyarakat dan dunia pendidikan (Yinger, 1973). Salah satu wujud dari responsif adanya kepekaan (daya tanggap) dan kesiapan Lemdikti dalam memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan.

### **Pengaruh Pendidikan Asing**

Walaupun sejumlah manfaat dapat diambil dari berlakunya pendidikan asing di Indonesia, sejumlah kekhawatiran tetap saja muncul. Kekhawatiran ini terutama berakar pada keyakinan bahwa melalui pendidikan, pemodal asing bisa saja “menjual” ideologi, pandangan hidup (*worldview*), dan nilai-nilai (*values*) yang dianutnya, memasarkan standarnya melalui pengajaran, yang kesemuanya itu bisa jadi tidak sejalan dengan karakter dan nilai-nilai yang selama ini dianut bangsa ini (Hamid, 2014). *Transfer of value* ini bisa dilakukan secara langsung atau secara samar-samar melalui lembaga-lembaga pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, meski peserta didik yang diajar secara akademik sudah relatif mapan, namun kita harus tetap berhati-hati untuk membuka diri terhadap modal asing, terutama melalui pendidikan formal. Hadirnya pendidikan asing juga berisiko akan meminggirkan pendidikan dalam negeri karena masyarakat melihat pendidikan asing sebagai lebih superior dan lebih berkualitas. Sudah bukan merupakan rahasia umum bahwa masyarakat kita lebih mengagumi dan mendewakan produk, budaya, dan hasil dari masyarakat luar dibandingkan kreasi anak bangsa. Hal ini tentunya sangat mungkin terjadi dalam

aspek pemilihan pendidikan, yang akan menggiring masyarakat berpendapatan tinggi untuk lebih memilih jasa pendidikan dari pihak asing. Persoalan yang lebih mendasar disini, bukan lagi berkisar pada mampu tidaknya lembaga pendidikan dalam negeri untuk bertahan dalam persaingan dengan lembaga pendidikan asing, namun jauh lebih luas dari itu, yakni ancaman terhadap norma-norma, ideologi, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang selama ini kita jaga dan kembangkan. Oleh karena itu, keadaan ini perlu mendapat perhatian dari elemen bangsa, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki komitmen pada pendidikan dan moral bangsa.

Idealnya lembaga pendidikan merupakan peredam kekhawatiran masyarakat akan dampak globalisasi. Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia seharusnya memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghadapi nilai-nilai budaya asing. Bentuknya berupa peranan lembaga pendidikan sebagai wahana membina ketahanan budaya sehingga lebih siap memasuki era pasar bebas dimana interaksi budaya berlangsung pesat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga pendidikan selain membina sikap budaya yang positif juga sekaligus dituntut mampu membentuk manusia yang cerdas dan terampil sesuai strategi pembangunan yang bertujuan membentuk dan menciptakan sosok manusia Indonesia seutuhnya (Suranto

Aw, 1997).

Besarnya peluang pendidikan asing dalam Pasal 90 UU Pendidikan Tinggi ini juga sekaligus menafikan masih banyaknya pekerjaan rumah bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi pengelola pendidikan tinggi seputar penguatan kurikulum yang berorientasi pada proses pembelajaran (Abdullah, 2007) dan tantangan komodifikasi maupun komersialisasi pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan akan terabaikan.

### Kondisi Lemdikti di Indonesia

Sejalan dengan kenyataan bahwa pendidikan telah masuk pada salah satu komoditi internasional *World Trade Organization (WTO)* melalui implementasi (*General Agreement on Trade in Services (GATS)*), maka bagi negara maju globalisasi pendidikan sabagai bagian liberalisasi pendidikan, telah memberikan kontribusi cukup menjanjikan di sektor ekonomi. Negara maju dengan kondisi budaya akademik dan perangkat pendidikan yang telah memenuhi standar kualitas unggul, mendapat nilai plus dalam melakukan globalisasi pendidikan. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih jauh tertinggal. Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dari kondisi daya saing Indonesia saat ini yang ternyata masih kalah dengan negara lain, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel Peringkat Daya Saing Indonesia dari 148 Negara di dunia**

Negara	Peringkat	Negara	Peringkat
Swiss	1	Malaysia	21
Singapura	2	Brunai Darussalam	26
Firlandia	3	Thailand	37
Jerma	4	Indonesia	38
Amerika Serikat	5	Filipina	59
Swedia	6	Vietnam	70
Hongkong	7	Laos	81
Belanda	8	Kamboja	88
Jepang	9	Myanmar	139
Inggris	10		

Sumber: *World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013 – 2014*

Di samping itu, apabila dilihat kondisi Lemdikti, masih banyak menghadapi masalah internal maupun eksternal, menjadi salah satu faktor yang memberatkan Indonesia menghadapi persaingan global. Kondisi problematik tersebut dapat menjadi penghambat dalam proses akselerasi pendidikan menuju globalisasi pendidikan. Selain problem di atas, catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menunjukkan ada sekitar 200 Lemdikti yang bermasalah, mulai dari konflik antar organ yayasan (pembina, pengurus, dan pengawas), konflik antara yayasan dan pimpinan Lembaga, ataupun konflik antara pimpinan dengan Senat (Kompas 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ada pembenahan yang bersifat segera, selain untuk memantapkan Lemdikti dalam menghadapi persaingan global, juga dimaksudkan agar tatanan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

### **Upaya Penyiapan dan Partisipasi Lemdikti**

Eksistensi dan kualitas Lemdikti dalam menghadapi persaingan global, akan ditentukan oleh tata kelola yang baik atau lebih sering disebut *Good University Governance (GUG)*. Semakin eksis suatu lembaga, maka tuntutan untuk memiliki tata kelola yang baik semakin kuat. Dengan tata kelola yang baik diharapkan Lemdikti dapat meningkatkan citranya kepada publik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap peran Lemdikti. Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Lemdikti akan ditentukan oleh akuntabilitas program dan kegiatan yang direncanakan, serta indikator-indikator penilaian kinerjanya. Masalah akuntabilitas Lemdikti dewasa ini, mendapat perhatian semakin serius seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Keinginan ini semakin keras, sekeras

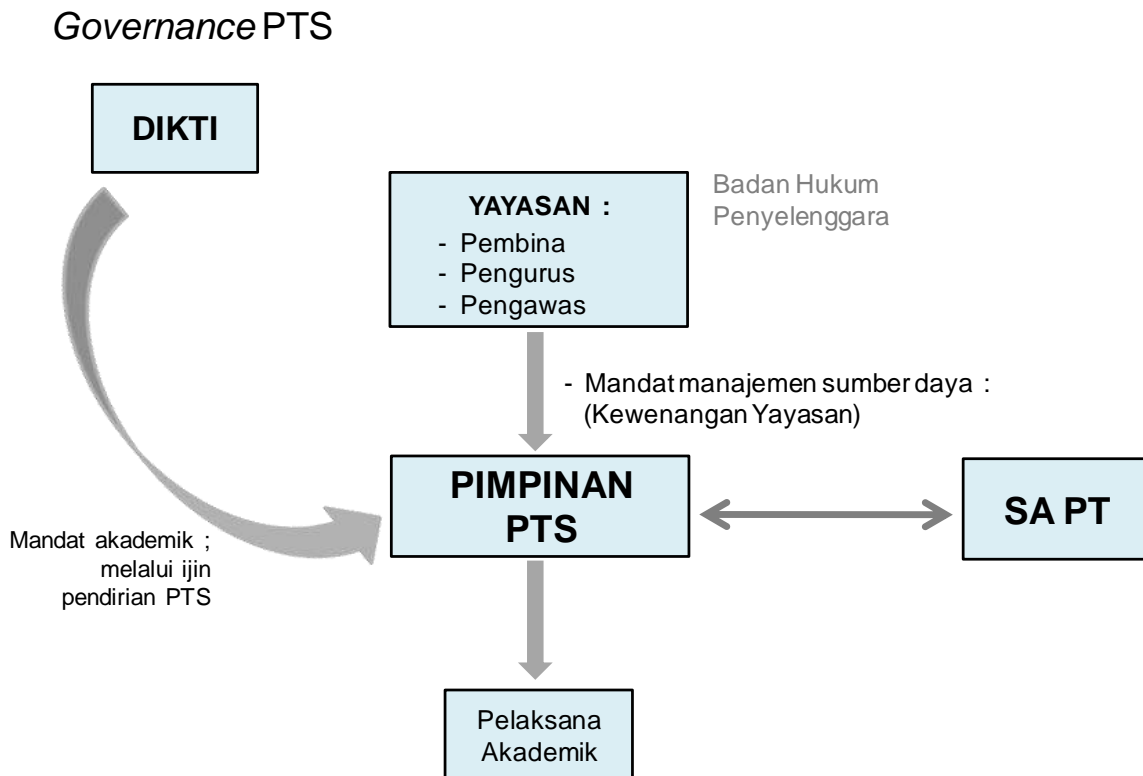
tuntutan akan reformasi dalam segala bidang. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan masyarakat pada masa kini berbeda dengan masa lalu, masyarakat tidak dengan mudah menerima apa yang diberikan oleh pendidikan, mereka yang membayar pendidikan merasa berhak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya (Sutini, 2014).

Dunia pendidikan yang citranya mulai kabur dari sudut pandang masyarakat sudah seharusnya dikembalikan kepada maknanya yang hakiki. Penguatan tata kelola akuntabilitas dan citra publik terhadap dunia pendidikan harus digunakan sebagai pilar kebijakan pelaksanaan pembangunan pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan menyikapi hal ini dengan melakukan redesain sistem yang mampu menjawab tuntutan masyarakat, yaitu dengan mengembangkan model manajemen pendidikan yang akuntabel. Menurut Sutini (fppt.com) dewasa ini telah terjadi pergeseran orientasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, antara lain: 1) perubahan orientasi dari ilmu ke gelar dan kemudian menjadi berorientasi pada kemampuan mendapatkan pekerjaan; 2) bertambahnya tuntutan program pendidikan tinggi, baik jumlah maupun jenis program studi; 3) kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi apakah sebuah lembaga pendidikan telah dikelola secara baik.

Pengaruh globalisasi termasuk MEA 2015, telah memberi peluang dan sekaligus tantangan bagi setiap individu, kelompok maupun institusi pendidikan. Mereka yang kreatif dan antisipatif dengan mudah dapat mengubah ancaman menjadi peluang melalui pola korporasi untuk membentuk kekuatan dalam memenangkan persaingan. Di sisi lain bagi yang tidak siap, secara natural justru akan ditinggalkan atau bahkan menjadi

lemah karena sumberdaya yang dimiliki termobilisasi ke tempat lain yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya Lemdikti membangun GUG, agar dapat bersaing dalam menarik minat

masyarakat, termasuk masyarakat Internasional. Proses pengelolaan Lemdikti menurut konsep GUG, adalah seperti gambar berikut :



Sumber : *Good University Governance*, fppt.com

Selanjutnya dalam pengelolaan Lemdikti, implementasi prinsip-prinsip tersebut, adalah sebagai berikut :

1) **Transparansi.** Transparansi diperlukan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara karyawan dan mahasiswa dengan pimpinan Lemdikti melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Berkaitan dengan hal tersebut pimpinan Lemdikti perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan. Kurangnya keterbukaan adalah salah satu sifat eksklusif yang mempersulit terciptanya GUG, karena kelompok yang memperak-

tekan perilaku yang tidak baik cenderung tertutup, serta tidak mudah dimonitor dan diawasi. Ketertutupan sudah bertentangan dengan prinsip *equal opportunity* untuk melakukan partisipasi secara terbuka. Regulasi dan praktek pengelolaan Lemdikti yang tidak menerapkan aspek keterbukaan, niscaya merupakan tantangan utama untuk terwujudnya GUG. Isu keterbukaan yang merupakan prasyarat bagi adanya akuntabilitas publik selayaknya menjadi modus operandi pengelolaan Lemdikti.

2) **Akuntabilitas.** Adanya akuntabilitas publik yang mencerminkan bahwa Lemdikti menjamin terlindunginya

kepentingan publik. Dalam bidang akademik, akuntabilitas publik dijaga melalui sistem akreditasi dan pemenuhan atas indikator kinerja akademik, seperti jumlah dan mutu hasil penelitian dan lulusan. Dalam bidang non-akademik, Lemdikti dinilai dari kemampuan untuk mengelola institusi secara efisien dan transparan, mengedepankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*GUG*). Sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara Lemdikti dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penyelenggara harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Di dalam lembaga yang demokratis, segala hal yang dikerjakan harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik.

- 3) **Responsif.** Responsif ditandai meningkatnya kepekaan para penyelenggara terhadap aspirasi karyawan dan mahasiswa, tanpa kecuali. Kurangnya responsif akan menimbulkan kehilangan keterhubungan, kehilangan partisipatif dan kehilangan kemampuan mengendalikan dalam kehidupan sosial kampus. Responsif adalah karakteristik Lemdikti yang mampu memberikan tanggapan sedini mungkin terhadap setiap masalah yang dihadapi. Kemampuan memberikan jawaban atas setiap masalah yang dihadapi menunjukkan kemampuan lembaga dalam memahami apa yang menjadi kebutuhan utama mereka. Kegagalan merespons setiap masalah yang dihadapi, menunjukkan ketidakpedulian lembaga, serta hilangnya *self of belonging* atas problem yang dihadapi.

- 4) **Adil.** Adil merupakan upaya memberi peluang yang sama bagi setiap anggota untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dari prinsip tersebut untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang levelnya rendah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan

- 5) **Independensi.** Suasana akademik dibangun oleh sivitas akademika dengan adanya kesetaraan, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik dibangun dengan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Kebebasan akademik dilaksanakan oleh dosen dengan pemberian kesempatan untuk mengembangkan potensi dan disiplin keilmuan yang dimiliki. Kebebasan mimbar akademik dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan program terencana untuk memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat akademik dalam forum akademik, seperti seminar, bedah buku, lokakarya, dan pameran. Hal lain yang tidak kalah pentingnya tentang independensi adalah sumberdaya yang sangat terbatas, sementara kebutuhan sangat beraneka ragam dan relatif tak terbatas. Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dengan tata pengelolaan harus mempunyai kesadaran untuk bersikap efisien dan efektif. Efisiensi dan efektivitas menjamin terselenggaranya pelayanan kepada mahasiswa dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Selanjutnya partisipasi karyawan dan mahasiswa dapat terwujud seiring dengan tumbuhnya rasa percaya mereka

kepada para penyelenggara Lemdikti. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila mereka memperoleh pelayanan dan kesempatan yang *setara (equal)*. Tidak boleh ada perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial antar mereka. Untuk itu perlu didorong agar setiap anggota mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi mereka. Rendahnya partisipasi mereka dalam pengelolaan, disebabkan oleh rendahnya kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi dalam memajukan lembaga.

Tridharma perguruan tinggi menuntut setiap perguruan tinggi untuk menegakan tiga tugas yakni: melaksanakan pendidikan/pengajaran, mengadakan penelitian, dan melakukan pengabdian pada masyarakat yang dimotori oleh dosen. Menurut Lanier *et al.* (1986) dosen harus menguasai materi akademik dan mempunyai skill untuk mengajar, serta mempunyai ketrampilan berkomunikasi dan kualitas pribadi. Karena pekerjaan dosen adalah suatu profesi, maka para dosen harus menjadi seorang yang profesional. Seorang profesional harus benar-benar menguasai bidang profesinya dan mencintai profesi tersebut. Untuk menjadi dosen yang profesional seseorang harus memiliki tiga dimensi dari kompetensi yang diperlukan yakni: kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan mengajar. Seorang dosen juga harus mempunyai kemampuan manajerial, baik dalam melaksanakan tugas utamanya maupun pada saat ditugaskan memegang jabatan struktural dan/atau sebagai panitia suatu program kegiatan.

Dengan demikian seorang dosen mempunyai tugas tanggung jawab yang sangat penting dalam sistem pendidikan tinggi, baik yang menyangkut penguasaan materi ajaran dan metode pembelajaran maupun penelitian dan manajemen yang menunjang keberhasilan tugas. Tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program pengembangan tenaga akademik adalah: (1) memperbaharui pengetahuan dan keterampilan tentang bidang studi, (2) mengenal kemajuan perlengkapan pengajaran, (3) mengenal hasil penelitian tentang proses pengajaran dan metode-metode mengajar yang baru, dan (4) mengikuti tuntutan masyarakat (Sutisna, 1989).

Selanjutnya Lembaga pendidikan dapat juga melakukan sejumlah upaya untuk membina budaya bangsa, diantaranya (1) memperkenalkan budaya bangsa yang luhur, (2) membina sikap realistis terhadap budaya tradisional, (3) membina kemampuan menangkal nilai budaya yang tidak relevan dengan pembangunan dan bertentangan dengan Pancasila, dan (4) menyelaraskan dengan kurikulum pendidikan sehingga pembinaan budaya dapat ditempuh dengan pendekatan monolitik dan juga integrative (Suranto Aw, 1997). Upaya ini tentunya membutuhkan tidak hanya keseriusan lembaga pendidikan, tetapi juga suprastruktur di atasnya berupa payung hukum dan dukungan pemerintah.

### **Komponen Penting yang Harus Diperiapkan**

Tidak mudah untuk mengawali proses untuk globalisasi pendidikan, selain adanya persiapan yang matang dari internal Lemdik juga harus ditopang dengan kemauan, komitmen, dan konsepsi kolektif dari semua pemangku kepentingan. Sebagai upaya untuk melangkah menuju globalisasi pendidikan tinggi, maka sesungguhnya lembaga

dituntut lebih dahulu memiliki kualitas, mampu mengembangkan sumberdaya seluruh pemangku kepentingan kampus, serta mampu berkompetisi dalam pasar global yang kompetitif. Oleh karenanya beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi kebijakan lembaga yang berfokus pada penelitian. Lemdikti sudah seharusnya menjadikan penelitian sebagai basis dalam penyelenggaraan akademiknya, sehingga dengan kontribusi nyata dalam bentuk penelitian dapat berperan dalam kancah persaingan global. Tugas penting tersebut, tentu bukan hanya dibebankan kepada tiap-tiap Lemdik, melainkan juga pemerintah harus terlibat dalam proses realisasinya. Sebagai perbandingan perguruan tinggi yang telah maju, seperti di Jepang, China dan Korea Selatan semuanya berawal dari komitmen pemerintah untuk mendorong dan mendukung perguruan tinggi, agar fokus dalam penelitian. Dengan kebijakan semacam itu maka pemerintah secara tidak langsung juga memberikan dorongan peningkatan sistem pendidikan universitas dengan meningkatkan kapasitas nasional mereka dalam bidang penelitian dan pengembangan (Hakim, 2013).
- b. Mendorong kerjasama antar departemen, antar disiplin ilmu, dan antar universitas di seluruh dunia dan mendukung pertukaran pengajar dan peneliti dari berbagai Negara dan bidang akademis dengan tujuan pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mampu membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang terfokus pada analisis kritis tentang globalisasi/internasionalisasi berdasarkan nilai dan prinsip kemanusiaan.
- c. Pengelola perguruan tinggi dalam kondisi kekinian (internasionalisasi

pendidikan) memang sudah saatnya menggeser orientasi dari *inward looking* ke *outward looking oriented*. Tentu saja penggeseran orientasi ini tidak sampai mengabaikan aspek konsolidasi internal untuk tetap solid menghadapi persaingan domestik yang juga semakin ketat. Upaya tersebut antara lain, implementasi *Good University Governance* dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Untuk menjawab bahwa sebuah PT konsisten mengelola dan menjamin aspek sumber daya (*resource*), isi (*content*), dan system nilai (*value system*) dengan baik, PT dituntut untuk menggunakan sistem manajemen (*management system*) yang baik dan teruji dan memiliki jaminan mutu (*quality assurance*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan memberikan nilai yang positif bagi setiap PT dalam keikutsertaannya pada globalisasi pendidikan.

## Penutup

Dengan memperhatikan gagasan *Knight* dan *de Wit* dalam Kusumastuti (2013), strategi dan kegiatan yang mungkin diperlukan untuk globalisasi pendidikan, antara lain; strategi program yang berfokus dalam pengembangan kurikulum, studi bahasa asing, proyek-proyek penelitian bersama, beasiswa, konferensi, dan seminar yang menghadirkan dosen tamu internasional, serta adanya komitmen, dukungan, dan keterlibatan dalam proses tersebut, dan kerjasama internasional. Pengembangan hal tersebut harus dilakukan secara simultan dengan tindakan sebagai berikut: 1). Pendekatan dan pengembangan aktifitas mahasiswa untuk ikut serta atau bergabung dalam program pertukaran pelajar/mahasiswa internasional; 2). Pendekatan kompetensi, PT diharuskan melakukan perubahan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan



dari semua *stakeholders* yang ada dalam PT; 3). Pengembangan etos (mengembangkan budaya dan iklim yang memfasilitasi proses menuju internasionalisasi pendidikan tersebut.

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, diharapkan setiap pemimpin Lemdikti dapat memberikan contoh yang baik, jujur kepada diri sendiri yang berarti sesuai perbuatan dengan kata hati nurani, dan jujur kepada orang lain yang ditandai dengan sesuainya kata dengan perbuatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar, 2007. *Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Balitbang Diknas.
- Bappenas, 2002. *Public Good Governance*. Jakarta. Direktorat Kelembagaan & Kerjasama Dikti. *Good University Governance*. fppt.com
- Hakim, Lukman Nul, 2013. *Meningkatkan Kualitas PT Lokal Melalui Internasional PT*. Info Singkat DPR RI, Vol, V, No.20/II/P3DI/Oktober/2013.
- Hamid, Edy S, 2014. *Mengukur Kesiapan Internasionalisasi PTS di Indonesia*. Yogyakarta: RPPP Aptisi V.
- Kusumastuti, Dyah. 2013. *Strategic Direction toward Internationalization Business and Management Education*. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol.4, No.3, June.
- Lanier, et al,1986. *Tomorrow's Teachers*. New York: The Holmes Group Inc.
- Robbins, S.P,1996. *Management*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Suranto Aw. 1997. *Peran Lembaga Pendidikan dalam Membina Budaya Bangsa Menghadapi Pasar Bebas*. Cakrawala Pendidikan, JIP, Vol. 16, No. 1. Yogyakarta: LPM UNY.
- Sutuni S., 2009. *Good University Governance*. fppt.com.
- Sutisna, 2010. Model Pelatihan Berbasis Kinerja. *Cakrawala Pendidikan*. XXIX (3), hal 365-378.
- Undang-undang RI Nomor 12/2012. *Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- World Economic Forum. 2013. *The Global Competitiveness Report 2013-2014*. Switzerland
- Yinger, J.M. 1973. *Handbook of Political Psychology*. San Fransisco: Jossey-Bass.